

Abstrak

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Negara ini mencakup sebelas siklus. Dari kesebelas siklus tersebut, Perencanaan kebutuhan dan penganggaran menjadi siklus fundamental yang menjadi awal perencanaan siklus lainnya. Salah satu dari siklus yang direncanakan tersebut adalah pada tahap pemeliharaan Barang Milik Negara. Pemeliharaan dilakukan agar Barang Milik Negara selalu dalam keadaan yang siap digunakan untuk memperlancar tugas dan fungsi pemerintahan. Sebagai salah satu Kuasa Pengguna Barang yang diberi wewenang dalam menggunakan Barang Milik Negara PSDKP Batam wajin pula merencanakan kebutuhan dan anggaran pemeliharaan aset negara yang dikuasakan kepadanya. Seringkali pada tahap perencanaan ini anggaran yang diterima tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan oleh Kuasa Pengguna Barang. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk menilai tingkat kesesuaian anggaran perencanaan RKBMN terhadap realisasi pada DIPA Pangkalan PSDKP Batam. Metode yang digunakan pada penulisan KTTA ini meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Melalui tinjauan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat realisasi anggaran RKBMN pada PSDKP Batam masih rendah bahkan di bawah 50% dari kebutuhan awalnya. Solusi dari ketidaksesuaian ini dapat digolongkan menjadi perspektif anggaran, pemakaian, dan pengamanan.

Kata Kunci : Barang Milik Negara (BMN), Kesesuaian, RKBMN, DIPA

Abstract

State-Owned Assets is all goods purchased or obtained at the expense of the State Budget or derived from other legitimate acquisitions. Management of State-Owned Assets covers eleven cycles. From this eleven cycles, requirements planning and budgeting are the fundamental cycles that become the beginning of other planning cycles. One of the planned cycles is at the stage of maintaining State-Owned Assets. Maintenance is carried out so that State Property is always in a state that is ready to be used to facilitate government tasks and functions. As one of the Proxy of Assets Users who is authorized to use State-Owned Assets, PSDKP Batam is also obliged to plan the needs and budget for the maintenance of state assets that are authorized to him. Often at this planning stage the budget received does not match the budget planned by the Assets User. The purpose of this review is to assess the level of suitability of the Stated owned Assets Requirement Planning budget to the realization based on PSDKP Batam Budget Execution (Allotment) Document. The method used in writing this KTTA includes literature study and interviews. Through this review, it can be concluded that the level of realization of the RKBMN budget at PSDKP Batam is still low, even below 50% of the initial requirement. Solutions to this discrepancy can be classified into budget, usage, and security perspectives.

Key Word : State-Owned Assets, Suitability, Budget Execution (Allotment) Document, Stated owned Assets Requirement Planning